Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X| E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/74m2ye36
Volume 05 No 01 Tahun 2025 Hlm. 1-7

Kontestasi Hukum dan Gender dalam Kepemimpinan Perempuan di Aceh: Studi atas Jabatan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal

Meri Andani

IAIN Langsa,
Jl. Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Kode Pos 24411, Kota Langsa, Indonesia
Meriandani2304@gmail.com

ABSTRACT

The issue of woman leaders has become a polemic among Indonesian ulama, some do not allow it and some allow it. Aceh in the 16th century was once led by a sultanah, the succession of the sultanah was inseparable from the role of ulama who legitimized that women could become leaders. The glory of Aceh's woman leaders has faded, this matter is no longer seen as a woman Acehnese leader who became a governor since independence in 1945. Men dominate starting from the first Governor Teuku Nyak Arief in 1945 to Irwandi Yusuf in 2017, not only the governor level at the district and city level, there are only two woman leaders who have served as Mayor and Deputy Regent, Hj. Illiza Saaddudin Djamal as Mayor of Banda Aceh and Hj. Afridawati as Deputy Regent of Simelulu Regency, while 23 regencies and cities in Aceh are still dominated by men. This study discusses the leadership of a woman Mayor in Banda Aceh, namely Hj. Illiza. She emerged as the first woman Mayor of Banda Aceh, replacing Mayor Mawardy Nurdin who died in 2014. During her leadership as Mayor, Hj. Illiza demonstrated various policies that she had implemented in managing the city of Banda Aceh, but during the 2017 mayoral election, the issue of women being forbidden to become leaders became one of the opinion drivers that made Hj. Illiza lose the mayoral election. This study uses a literature review by taking data from books, articles, newspapers, and the internet related to women's leadership in Aceh and about Mayor Hj. Illiza Saaduddin Djamal. The presence of Hj. Illiza as Mayor of Aceh revived the presence of women leaders in Aceh. Like Sultanah who received legitimacy from the ulama and the rejection of the ulama regarding women's leadership, the situation of Hj. Illiza as Mayor repeats history, where leadership is legitimized by some ulama and also rejected by some ulama. Her rejection as a woman leader was intense during the 2017 Banda Aceh mayoral election, until in 2024, Hj. Illiza was re-elected as Mayor.

Keywords: *Woman Leaders, Hj. Illiza, Ulama, Mayor*

ABSTRAK

Isu kepemimpinan perempuan telah menjadi polemik di kalangan ulama Indonesia, sebagian tidak memperbolehkannya dan sebagian memperbolehkannya. Aceh pada abad ke-16 pernah dipimpin oleh seorang sultanah, suksesi sultanah tidak terlepas dari peran ulama yang melegitimasi bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin. Kejayaan para pemimpin perempuan Aceh telah memudar, hal ini tidak lagi terlihat seperti pemimpin perempuan Aceh yang menjadi gubernur sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Laki-laki mendominasi mulai dari Gubernur pertama Teuku Nyak Arief pada tahun 1945 hingga Irwandi Yusuf pada tahun 2017, tidak hanya di tingkat gubernur di tingkat kabupaten dan kota, hanya ada dua pemimpin perempuan yang pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Bupati, yaitu Hj. Illiza Saaddudin Djamal sebagai Walikota Banda Aceh dan Hj. Afridawati sebagai Wakil Bupati Kabupaten Simelulu, sementara 23 kabupaten dan kota di Aceh masih didominasi oleh laki-laki. Studi ini membahas kepemimpinan

seorang Walikota perempuan di Banda Aceh, yaitu Hj. Illiza. Beliau muncul sebagai Walikota perempuan pertama Banda Aceh, menggantikan Walikota Mawardy Nurdin yang meninggal pada tahun 2014. Selama kepemimpinannya sebagai Walikota, Hj. Illiza menunjukkan berbagai kebijakan yang telah diimplementasikannya dalam mengelola kota Banda Aceh, namun selama pemilihan walikota tahun 2017, isu perempuan yang dilarang menjadi pemimpin menjadi salah satu pendorong opini yang menyebabkan Hj. Illiza kalah dalam pemilihan walikota. Studi ini menggunakan tinjauan pustaka dengan mengambil data dari buku, artikel, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di Aceh dan tentang Walikota Hj. Illiza Saaduddin Djamal. Kehadiran Hj. Illiza sebagai Walikota Aceh menghidupkan kembali kehadiran pemimpin perempuan di Aceh. Seperti Sultanah yang menerima legitimasi dari ulama dan penolakan ulama terkait kepemimpinan perempuan, situasi Hj. Illiza sebagai Walikota mengulang sejarah, di mana kepemimpinan dilegitimasi oleh sebagian ulama dan juga ditolak oleh sebagian ulama. Penolakan terhadapnya sebagai pemimpin perempuan sangat kuat selama pemilihan walikota Banda Aceh tahun 2017, hingga pada tahun 2024, Hj. Illiza terpilih kembali sebagai Walikota.

Kata Kunci: Tokoh Perempuan, Hj. Illiza, Ulama, Walikota

PENDAHULUAN

Persoalan pemimpin perempuan sudah menjadi polemik di kalangan ulama nusantara, ada yang tidak memperbolehkan dan ada yang memperbolehkan. Aceh pada abad ke 16 pernah dipimpin seorang sultanah, suksesi sultanah tidak lepas dari peran ulama yang meligitimasi bahwa perempaun boleh menjadi pemimpin. Nurudin Ar-Raniry adalah ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, fatwa ini kemudian direspon mufti Mekkah bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Tetapi fatwa tersebut tidak ditanggapi Nurudin Ar-Raniry, dan tetap menafsirkan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin, hal ini karena tidak lepas dari situasi. Diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin diperkuat oleh fatwa Abdu Rauf As-Singkil, sehingga secara berturut-turut kesultanan dipimpin oleh perempuan Sultanah Safiyatuddin (W. 1675), Sultanah Nakiatuddin (W. 1678), Sultanah Zaqiyatuddin Inayat Shah (W. 1688) , dan Sultanah Kamal Shah (Bustaman-Ahmad 2007).

Pada masa Sultanah Safiyatuddin dia menunjukan perannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan meminta sejumlah Abdur Rauf As-Singkili menulis kitab, menjadi kedudukan perempaun meningkat, dengan diperbolehkannya perempuan mendapat pendidikan dan bekerja di lembaga negara, serta mempertahan Aceh dari serang kolonial Belanda.(Ramadhani dan Wijiyanto 2022) Sultanah Nakiatuddin memimpin Aceh hanya dalam waktu dua tahun empat bulan, perkembangan yang sempat dicatat adalah pembentukan Aceh menjadi tiga wilayah yang dipimpin oleh Panglima Sagoe. Sultanah Zaqiyatuddin Inayat Shah saat kepemimpinannya didatangi utusan dari Inggris dan Mekkah, dan situasi kesultanan dalam keadaan stabil. Terakhir Sultanah Kamal Shah, pada masa ini sejumlah ulama yang memahami perempuan haram menjadi pemimpin mendesak Sultanah Kamal Shah turun dari tampuk kepemimpinan sebagai Sultanah (Suud 2015).

Kejayaan pemimpin perempuan Aceh telah memudar, ihwal ini tidak lagi terlihat pemimpin perempuan Aceh yang menjadi gubernur terhitung sejak kemerdekaan 1945. Laki-laki mendominasi mulai dari Gubernur pertama Teuku Nyak Arief pada tahun 1945 hingga Irwandi Yusuf di tahun 2017, tidak hanya tingkat gubernur pada wilayah kabupaten dan kota terhitung hanya dua pemimpin perempuan yang sempat menduduki sebagai Wali Kota dan Wakil Bupati, Hj. Illiza Saaddudin Djamal sebagai Wali Kota Banda Aceh dan Hj. Afridawati sebagai Wakil Bupat Kabupaten

Simelulu, sedangkan 23 Kabupaten dan Kota di Aceh masih dimonasi laki-laki. Masyarakat Aceh masih menganggap bahwa laki-laki lebih baik menjadi pemimpin dibandingkan perempuan, ditambah sejumlah ulama memfatwakan haram perempuan jadi pemimpin, hal ini menambah sulitnya perempuan untuk bisa menduduki kursi kepemimpinan baik di tingkat kabupaten, kota, maupun daerah. Padahal jika ditarik dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam pemimpin perempuan memiliki adil yang besar dalam memengaruhi peradaban Aceh.

Kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam sudah banyak dikaji. Fatima Mernissi dalam buku *Ratu-Ratu Islam* memperlihatkan disejumlah wilayah yang didominasi Islam pernah dipimpin seorang perempuan dan mengalami berbagai suksesi kepemimpinan(Mernissi 1997) lalu Neng Dara Afifah dalam buku *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas* mengulas tentang kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden perempuan pertama yang menjadi di Indonesia, bahwa Megawati memiliki pendukung massa yang kuat tapi disisi lain saat kepemimpian sebagai presiden dianggap mengecewakan maka kualitas diri sebagai perempuan yang dipermasalahkan karena dianggap perempuan lemah dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin (Affiah 2017). Kemudian M. Khairunnas yang mengkaji *Kepemimpinan Perempuan Aceh* melihat bahwa hambatan perempuan menjadi pemimpin Aceh adalah penerapan sistem Syariat Islam yang membuat perempuan tidak bebas. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi dalam segalam aspek hingga membuat perempuan rentan mengalami perilaku diskriminasi (M. Khairunnas dkk. 2022).

Berpijak dari penelitian yang ada, penelitian ini membahas kepemimpinan Wali Kota perempuan di Banda Aceh yakni Hj. Illiza. Ia tampil sebagai Wali Kota Banda Aceh perempuan pertama, yang posisinya menggantikan Wali Kota Mawardy Nurdin yang meninggal pada tahun 2014. Selama kepemimpinan sebagai Wali Kota Hj. Illiza menunjukan berbagai kebijakan yang telah ia lakukan dalam menata kota Banda Aceh, tapi pada saat tahun 2017 pemiliha Wali Kota, isu haram perempuan menjadi pemimpin menjadi salah satu giringan opini yang membuat Hj. Illiza kalah dalam pemililihan Wali Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan literatur review dengan mengambil data dari buku, artikel, koran, dan internet yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di Aceh dan tentang Wali Kota Hj. Illiza Saaduddin Djamal. Analisis dalam penelitian meminjam teori Foucalt bagaimana wacana kepemimpinan perempuan tampil di ruang publik, dalam konteks ini dilihat Aceh yang dikenal menerapkan hukum Islam sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus dipahahami memiliki pemahaman Islam yang konservatif. Suara ulama Aceh memainkan peran vital dalam menentukan wacana di Aceh, dalam penelitian kami mengamati bagaimana ulama Aceh memahami kepemimpinan perempuan saat Hj. Illiza Saaduddin Djamal menjabat sebagai Wakil Wali Kota.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Hj. Illiza Saaduddin Djamal

Banda Aceh sebagai ibu kota Aceh memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2007, Banda Aceh mengadakan pemilihan wali kota yang menjadikan terpilihnya Mawardy Nurdin dan Hj. Illiza Saaduddin Djamal sebagai wali kota dan wakil wali kota. Illiza adalah perempuan yang berhasil menjadi wakil wali kota. Dan pada tahun 2012 Mawardy Nurdin dan Illiza terpilih lagi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tapi pada tahun 2014, Mawardy Nurdin meninggal, dan suksesi Wali Kota digantikan oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal.

Illiza mengenyam pendidikan MIN Band Aceh (1985), lalu melanjutkan di luar Aceh dalam jenjang MTsN III PP di Jakarta (1988) kembali lagi ke Aceh di SMA Negeri Banda Ache (1991) kuliah di STIM Banda Aceh (2006). Karir Illiza sebagai politisi perempuan Aceh sudah dimulai pada tahun 1999 saat menjadi Dewan Pimpin Cabang PPP sebagi wakil Bendaharan hingga pada

tahun 2004 - 2006 sebagai anggota DPRD kota Banda Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan. Kehadiran perempuan masuk dalam sektor pemerintahan sudah dimulai dari jenjang pendidikan yang memberikan hak (M. Khairunnas dkk. 2022) sama terhadap laki-laki dan perempuan, dalam pengamatan Kamaruzzaman Bustaman Ahmad (2015) perempuan Aceh baik di kampung dan perkotaan menunjukan ketangguhannya, di kampung perempuan Janda tampil mandiri dan giat bekerja membesarkan anak. Sedang perempuan di kota, menempati pekerjaan dari pinggir jalan hingga perkantoran, perempuan terdidik bekerja sebagai dosen, peneliti, aktivis LSM, hingga kepala pemerintahan (Bustaman-Ahmad 2015). dalam situasi perempuan yang banyak tampil di ruang publik sebagai pekerja tersebutlah kepemimpinan Illiza sebagai Wali Kota Banda Aceh bisa eksis dan bertahan.

Kepemimpinan Illiza

Pada tahun 2014 – 2017 saat menjadi Wali Kota, Illiza menunjukan kiprahnya sebagai pemimpin perempuan, banyak penghargaan diraihnya serta membuktikan kemampuannya dalam mengelola kota Banda Aceh. Pandangan ulama Aceh terhadap bolehnya perempuan menjadi pemimpin terbagi dua, ada ulama yang memperbolehkan dengan alasan bahwa Aceh pernah dipimpin oleh seorang perempuan (sultanah) dan dan adanya pahlawan perempuan dari Aceh. Sedang ulama yang menolak perempuan menjadi pemimpin mendasarkan pada konsep *qawamun* (*'ala al-nisa'I)* dan memandang kepemimpinan perempuan pada masa kesultanan adalah bentuk kepemimpinan darurat, serta menganggap kepemimpinan sultanah penyebab kehancuran kesultanan Aceh.(Ichwan 2019)

Pada tahun 2017, ketika Illiza maju sebagai kontestasi pemilu ia berhadapan dengan Aminullah Usman. Persoalan pemimpin perempuan dalam Islam yang sebelumnya tidak begitu dipermasalahkan, saat kontestasi berlangsung keharaman perempuan menjadi pemimpin disuarakan oleh lawan politiknya Aminullah Usman, yang juga didukung oleh sejumlah ulama Aceh. Pada tahun 2016 Abu Mudi seorang ulama kharismatik pemimpin Dayah Mudi Mesra dan ketua Himpunan Ulama Dayah (HUDA) mengelurkan fatwa haram memilih perempuan menjadi pemimpin, memilih dan melantiknya (Ichwan 2019) Merespon keharaman perempuan menjadi pemimpin, Illiza menyatakan tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin hanya dalam urusan rumah tangga dan imam shalat. Sedang dalam urusan sosial masyarakat, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memimpin, ia meminta pendapat dari ketua Majelis Permusywaratan Ulama (MPU) tentang kebolehan perempuan menjadi pemimpin, dalam hal tersebut Ketua MPU mengatakan bahwa mereka berpegang kepada pendapat ulama terdahulu, Syekh Abdur Rauf As-Singkili yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin (Serambi 2017). Tapi argumen yang Illiza sampaikan tetap membuatnya kalah dalam kontestasi pemilihan Wali Kota, salah satu penyebabnya adalah fatwa pengharaman perempuan menjadi pemimpin.

Kepemimpinan Perempuan Aceh

Sejarah Aceh dipenuhi dengan kisah kepemimpinan perempuan dari zaman kesultanan, perjuangan melawan Belanda, hingga konfil GAM dan TNI, dari Laksamana Hayati sebagai pemimpin prajurit kerajaan Aceh Darussalam, naiknya empat sultanah yang memimpin kerajaan Aceh mulai dari Sultanan Safiatuddin, Sultanah Naqiatudin, Sultanah Zaqiatuddin, Sultanah Kamalat Syah, pada masa pendudukan Belanda para pejuang dipimpin perempuan pemberani seperti Cut Nyak Dien dan Cut Muetia, memasuk kemerdekaan lalu terjadinya konfilk GAM dan TNI peran perempuan tak kalah mencuat, salah satu pasukan perempuan GAM adalah Inong Balee yang dipimpin oleh Azizah. Pasca Tsunami 2004 yang kemudian diiringi dengan rekonsiliasi antara Indonesia dengan Aceh yang ditujukan melalu perjanjian Helsinki, posisi perempuan sebagai pemimpin kurang mendapat perhatian. Meski begitu, perempuan mulai lebih muncul di ruang publik dengan menjalani berbagai pekerjaan dan profesi.(Bustaman-Ahmad 2015)

Kiprah perempuan Aceh dalam politik masih mendapat hambatan, hal ini tidak lepas dari konstruksi sosial yang menganggap bahwa perempuan lemah, dan

perlu dilindungi oleh laki-laki. Polikpun masih dianggap sebagai tempat bagi laki-laki, selain itu minat perempuan untuk terjun ke politik masih kurang karena dianggap politikitu kotor. Padahal posisi perempuan penting dalam politik, terutama dalam menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan yang selama ini mendeskriminasi perempuan.

Perempuan pada dasarnya selalu diharapkan menjadi sosok yang lemah lembut dan menurut, ketika sudah berkeluarga perempuan diharuskan tunduk dengan suami dan senantiasan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Akibatnya sering muncul stigma bahwa pekerjaan perempauan hanya di kasur, di sumur, dan di dapur. Padahal pada saat ini telah banyak perempuan yang berpendidikan yang telah menunjukan eksistensinya dalam segala bidang, termasuk dalam bidang politik.

Saat perempuan terjun ke dalam politik, partai politik memberlakukan keharusan perempuan membuat surat izin dari suami, ihwal ini memperlihatkan bahwa perempuan dianggap belum memiliki kemandirian dan tetap harus patuh terhadap suami. Wacana kepatuhan telah dibangun melalui pendidikan dari keluarga dan lingkungan, sehingga banyak perempuan membenarkan apa saja yang telah dikontruksikan (M. Khairunnas dkk. 2022).

Ketika perempuan berhasil menjadi pemimpin dan salah mengambil kebijakan, maka keperempuanan yang diisalahkan terlebih dahulu, dibanding dengan pemimpin laki-laki yang keliru mengambil kebijakan maka yang disalahkan hanya kebijakan saja tanpa mengaitkannya dengan perempuan.

Hal yang paling fundamental adalah pendapat ulama tentang perempuan menjadi pemimpin, masih banyak ulama Aceh yang berpendapat bahwa perempuan haram menjadi pemimpin. Perempuan dianggap lemah dalam mengambil keputusan. Hal ini terjadi sejak naiknya Sultanah Safiatuddin menjadi pemimpin kerajaan Aceh, beberapa ulama mencari pendapat tentang bagaiama hukum perempuan menjadi pemimpin. Hingga pada saat Sultanan Kamalat Syah diturunkan dari suksesi kepemimpinan karena munculnya fatwa haram perempuan menjadi pemimpian. Ihwal ini kemudian terulang lagi saat Hj. Illiza mencalonkan diri sebagai Wali Kota Banda Aceh 2017, muncul pendapat ulama bahwa perempuan haram menjadi pemimpin, padahal selama menjabat dari tahun 2014 – 2017, Hj. Illiza telah menunjukan kemampuan sebagai Wali Kota yang berhasi memajukan kota Banda Aceh.

Strategi Kemenangan Wali Kota Banda Aceh Hj. Illiza Saaduddin Djamal dalam Pemilu 2024 dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Hj. Illiza Saaduddin Djamal dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan berpengaruh di Banda Aceh. Sebagai mantan Wali Kota Banda Aceh, ia memiliki rekam jejak penting dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam di wilayah tersebut. Menjelang Pemilu 2024, strategi politiknya kembali menjadi perhatian publik, terutama dalam upayanya menarik dukungan dari masyarakat Aceh yang dikenal religius dan konservatif Meski demikian, kepemimpinan perempuan dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, khususnya terkait dengan interpretasi hukum Islam mengenai posisi perempuan sebagai pemimpin (Marzuki 2014).

Strategi Kemenangan dalam Pemilu 2024

Untuk mencapai kemenangan dalam Pemilu 2024, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal menerapkan sejumlah strategi utama:

1. Pendekatan Religius dan Penerapan Syariat Islam
   Sebagai sosok yang dikenal tegas dalam menegakkan syariat Islam, Illiza membangun citra sebagai pemimpin yang mampu menjaga nilai-nilai keislaman di Banda Aceh. Pendekatan ini berhasil menarik dukungan dari kelompok Islam konservatif yang menginginkan pemimpin berkomitmen terhadap norma agama dalam pemerintahan.
2. Jaringan Politik yang Kuat
   Berbekal pengalamannya sebagai Wali Kota, Illiza memiliki jaringan politik yang luas, baik di kalangan tokoh agama, organisasi keislaman, maupun komunitas masyarakat.

Dukungan partai berbasis Islam serta para ulama setempat menjadi faktor penting yang memperkuat basis pendukungnya.

3. Kampanye Berbasis Media Sosial dan Dakwah
   Di tengah perkembangan teknologi informasi, Illiza memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menyampaikan visi dan misinya. Melalui platform tersebut, ia membangun narasi kepemimpinan yang menonjolkan nilai-nilai Islami serta kedekatan dengan masyarakat.
4. Peran Perempuan dalam Politik Islam
   Meskipun terdapat perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam, Illiza menegaskan bahwa perannya sebagai pemimpin lebih dimaknai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini membuatnya diterima oleh berbagai kalangan, termasuk kelompok perempuan yang ingin berperan aktif dalam dunia politik.

KESIMPULAN

Kiprah perempuan di Aceh tidak hanya berhenti dalam kepemimpinan Sultanah, tapi terlihat dalam perjuangan perempuan Aceh dalam menghadapi kolonial Belanda yang terlihat dalam sosok Laksamana Malahayati(Moerdopo 2018), Cut Nyak Dien(Lulofs 2017) dan Cut Nyak Muetia(Zahrina 2021), . Mereka tampil sebagai perempuan yang gigih memberikan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Pada masa kemerdekaan peran perempuan Aceh mulai tereduksi dengan adanya konfilk antara DI/TII yang dipimpin Dauh Bereuh dengan Pemerintah Pusat Presiden Sukarno, peristiwa yang bermula karena Sukarno tidak menepati janji kepada Aceh untuk tetap bisa menerapkan syariat Islam. Konflik berlanjut dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin Hasan Di Tiro berhadap dengan pemerintahan Suharto, konflik ini disebabkan adanya ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Adanya konflik yang berkepanjangan membuat perempuan Aceh banyak mengalami kekerasan, dari pelecehan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Kehadiran Sosok Hj. Illiza sebagai Wali Kota Aceh membangkitkan kembali kehadiran pemimpin perempuan di Aceh. Seperti Sultanah yang mendapat legitimasi dari ulama dan adanya penolakan dari ulama soal kepemimpinan perempuan, situasi Hj. Illiza sebagai Wali Kota mengulang sejarah, bahwa kepemimpinan dilegitimasi sebagian ulama dan juga ditolak sebagian ulama. Penolakan dirinya sebagai pemimpin perempuan gencar ketika pemimilihan Wali Kota Banda Aceh 2017. Akan tetapi pada tahun 2024, Hj. Illiza bisa terpilih sebagai Wail Kota Bandan Aceh, berkat strategi untuk meminta dukungan ulama dan menepis isu haramnya perempuan jadi pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Affiah, Neng Dara. 2017. *Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Bustaman-Ahmad, Kamaruzzaman. 2007. "The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study Of Aceh The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study Of Aceh." *Journal of Indonesian Islam* 1 (1): 135–80.

Bustaman-Ahmad, Kamaruzzaman. 2015. "Perempuan Aceh dalam Perspektif Antropologi." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1 (2): 37–48.

Ichwan, Moch Nur. 2019. "Ulama, Negara-Bangsa, dan Etnonasionalisme Religius: Kasus Bandu Aceh." Dalam *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-Kota Indonesia*, disunting oleh Ibnu Burdah, Najib Kailani, dan Munirul Ikhwan. PusPIDeP.

Lulofs, M. H. Székely. 2017. *Cut Nyak Din : Kisah Ratu Perang Aceh*. Komunitas Bambu.

M. Khairunnas, Harmona Daulay, dan T. Ilham Saladin. 2022. "Kepemimpinan

Perempuan Aceh." *Perspektif* 11 (40: 1559–68.

Marzuki. 2014. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA PESANTREN DI ACEH." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 19 (1): 167–84.

Mernissi, Fatima. 1997. *Ratu-ratu Islam: yang terlupakan*. Mizan.

Moerdopo, Endang. 2018. *Laksamana Malahayati : Sang Perempuan Keumala*. Grasindo.

Ramadhani, Desy, dan Septian Teguh Wijiyanto. 2022. "Sulthanah Taj'al Alam Safiatuddin Syah: Nilai Inspirasi Dan Kontribusi Dalam Memimpin Kesultanan Aceh 1641-1675." *RINONTJE: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 3 (2): 32–42.

Serambi. 2017. "Soal Pemimpin Perempuan, Ini Kata Illiza." *Serambi*. https://aceh.tribunnews.com/2016/10/02/soal-pemimpin-perempuan-ini-kata-illiza.

Suud, Fitriah M. 2015. "Perempuan Islam Dalam Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699 M)." *Serambi Tarbawi* 3 (1): 23–42.

Zahrina, Cut. 2021. *Cut Nyak Muetia (Kisah Perjuangan Perempuan Aceh)*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh.